

## POLITICAL PARTICIPATION OF BEGINNER ELECTORS IN THE 2018 LEGISLATIVE ELECTIONS IN BULUKUMBA REGENCY

Andi Armayudi Syam<sup>1</sup>, Anwar Parawangi<sup>2</sup>, H. Muhammadiyah<sup>3</sup>, Hj. Fatmawati<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia  
e-mail: [armayudi@gmail.com](mailto:armayudi@gmail.com)

### Abstract

*This study aimed to describe the form of Political Participation of Beginner Electors in the 2018 Legislative Election in Bulukumba Regency. The method used in this research was qualitative with a case study approach, this assessment used the instruments of observation, interview and documentation. Informants were selected by purposive sampling. Then data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study showed that, (1) electoral activity where through the provision of education by conducting direct field learning, one of the methods carried out, opened creative space for novice electors through channeling interests, talents and hobbies of novice electors who exist in the middle of society. (2), lobbying where the candidates explained starting from program offered. (3) organizational activities that further encouraged active participation of electors by involving them in the winning team structure. (4), contacting through campaign activities and voting in providing related offers. the needs and problems of electors that would be taken into consideration for candidates if they succeed in becoming winners in the legislative election event in Bulukumba Regency. And (5), violence The novice electors also did not hesitate to conduct demonstrations demanding the government if there was a violation in the process of administering the government in Bulukumba Regency.*

**Keywords:** *Participation, Beginner Electors, and Legislative Elections*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menggambarkan bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2018 di Kabupaten Bulukumba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penilaian ini menggunakan instrument observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling. Kemudian teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) *electoral activity* dimana melalui pemberian edukasi dengan melakukan pembelajaran dilapangan secara langsung salah satu metode yang dilakukan, membukakan ruang kreasi bagi para pemilih pemula melalui penyaluran minat dan bakat serta hoby para pemilih pemula yang sedang eksis di tengah-tengah masyarakat. (2), *lobbying* dimana para kandidat memaparkan mulai dari penawaran program.(3) aktivitas organisasi yang lebih mendorong partisipasi aktif para pemilih dengan melibatkan mereka pada struktur tim pemenangan.(4), *contacting* melauli kegiatan kampanye dan pencoblosan dalam memberikan penawaran-penawaran terkait kebutuhan dan permasalahan pemilih yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi para kandidat jika berhasil menjadi pemenang pada perheletan pemilihan legislative di Kabupaten Bulukumba. Dan (5), *violence* Para pemilih pemula juga tidak segan-segan melakukan aksi demonstrasi menuntut pemerintah jika terjadi pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba.

**Kata Kunci :** *Partisipasi, Pemilih Pemula, dan Pemilihan Legislatif*

## 1. PENDAHULUAN

Partisipasi politik masyarakat merupakan syarat pokok yang harus dilakukan oleh setiap warga negara terutama pada negara yang menganut paham demokrasi. Tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat tersebut memiliki kepekaan terhadap setiap masalah

politik yang ada serta memiliki keinginan untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tersebut telah ikut mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis.

Dalam kategori politik kaum remaja dimasukan dalam pemilih pemula, mereka adalah kelompok yang baru pertama kali

menggunakan hak pilih. Dengan hak pilih itu kaum remaja yang berusia 17 tahun atau sudah menikah ini akan mempunyai tanggung jawab kewarganegaraan yang sama dengan kaum dewasa yang lain. Para pemilih pemula yang kebanyakan dari siswa siswi sekolah menengah atas serta mahasiswa/mahasiswi yang baru memasuki usia hak pilih pastilah belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan ke mana mereka harus memilih. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alasan inilah yang menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk digarap dan didekati dengan pendekatan materi.

Dari data yang kami himpun dapat dilihat bahwa ada 1164 responden atau (94,6%) dari 1230 responden menyatakan bahwa mereka akan memilih sesuai pikiran dan hati nurani sendiri. Hal ini bisa menjadikan mereka hanya akan memilih calon yang mereka kenali saja dan rentan sekali dengan adanya pengaruh dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab jika para pemilih pemula ini tidak mendapatkan pendidikan dan pengetahuan politik yang cukup.

Pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih juga belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan kemana mereka harus memilih. Sehingga, terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alasan ini yang menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk dipengaruhi dan didekati dengan pendekatan materi politik kepentingan partai-partai politik. Ketidaktahuan dalam soal politik praktis, terlebih dengan pilihan-pilihan dalam pemilu atau pilkada, membuat pemilih pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek. Pemilih pemula sering hanya dimanfaatkan oleh partai politik dan politisi untuk kepentingan politiknya, misalkan digunakan untuk penggalangan masa dan pembentukan organisasi partai.

Perilaku pemilih pemula memiliki karakteristik yang biasanya masih labil dan apatis, pengetahuan politiknya kurang, cenderung mengikuti kelompok sepermainan dan mereka baru belajar politik khususnya dalam pemilihan umum. Ruang-ruang tempat di mana mereka belajar politik biasanya tidak jauh dari ruang yang dianggap memberikan rasa kenyamanan dalam diri mereka.

Memahami kesadaran politik mahasiswa pemilih pemula dalam pemilihan umum maka tentu perlu pendidikan politik dalam mendorong partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan.

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan. Di sebelah Utara daerah ini berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, di Timur berbatasan dengan Teluk Bone, di Selatan dengan Laut Flores, dan di Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,7 Km<sup>2</sup> atau sekitar 2,5% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan secara administratif, terbagi dalam 10 kecamatan, dan terbagi kedalam 27 kelurahan dan 99 Desa.

Kesadaran politik pemilih pemula dapat kita katakan sebagai salah satu faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan takaran seseorang terlibat dalam partisipasi politik. Maka dari itu, sosialisasi politik sangatlah penting untuk dilakukan terkhusus untuk pemilih pemula.

Meningkatkan partisipasi politik pada pemilih pemula di Kabupaten Bulukumba merupakan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak yang bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan dan menyukseskan pemilihan umum seperti legislatif. Selain KPU Kabupaten Bulukumba, partai politik dan tokoh politik Kabupaten Bulukumba memiliki peran dan kepentingan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula guna menambah dukungan dan memaksimalkan pemilihan pada pemilih pemula di Kabupaten Bulukumba. Kekhawatiran tersebut harus diantisipasi agar tidak ada oknum, pihak, atau kelompok yang memanfaatkan pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan umum Kabupaten Bulukumba. Hal tersebut yang harus menjadi perhatian penting dan harus diantisipasi oleh KPU Kabupaten Bulukumba agar pelaksanaan pemilihan umum Kabupaten Bulukumba dapat maksimal.

Tidak ada salahnya jika hal tersebut menjadi salah satu perhatian utama, karena pemilih pemula juga berhak menentukan siapa

yang pantas memimpin Kabupaten Bulukumba kedepan. Pemilih pemula dalam keikutsertaannya dalam dunia politik sangat menentukan kemenangan calon dalam sebuah pemilihan. Oleh sebab itu disinilah peran partai politik dan kandidat dalam sosialisasinya untuk mencari dukungan dan meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula untuk turut serta berpartisipasi dan menggunakan hak politiknya dalam pemilihan umum di Kabupaten Bulukumba.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan (Khairudin, 2019).

Partisipasi harus mencakup kemampuan rakyat untuk mempengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah lokal melihat partisipasi sebagai hal yang perlu, tetapi berpotensi menjadi penghambat terhadap agendanya, seperti sesuatu yang harus dibayar dengan janji belaka; pekerja masyarakat melihatnya sebagai memiliki kekuatan untuk mempengaruhi (Tesoriero, 2008).

Partisipasi memang merupakan konsep yang problematis. Sejarah proyek-proyek partisipasi masyarakat memang penuh dengan lubang-lubang contoh tokenisme, dan rakyat telah benar-benar belajar untuk melihat desakan berpartisipasi dengan sangat skeptis, karena kebanyakan orang memiliki pekerjaan lain yang lebih penting daripada menghabiskan waktu dengan melakukan kegiatan partisipasi simbolis (Sutrisno, 2017).

Partisipasi sebagai suatu tindakan yang mendasar untuk bekerjasama yang memerlukan waktu dan usaha, agar menjadi mantap dan hanya berhasil baik dan terus maju apabila ada kepercayaan. Dengan kata lain, memberikan batasan partisipasi sebagai suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam perencanaan suatu pelaksanaan dari gejala sesuatu yang berpusat pada kepentingannya dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat

kematangan dan tingkat kewajibannya, Poerbakawatja dalam (Hadi, 2015).

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers dalam (Tumbel, 2017) sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut.

Adapun teknik yang dilakukan dalam mengimput data adalah sebagai berikut; wawancara, observasi dan studi dokumentasi dan langkah selanjutnya adalah melakukan proses analisis yaitu; reduksi data, menyajikan data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Kemudian uji keabsahan datanya melalui; perpanjangan masa pengamatan, teknik meningkatkan ketekunan dan triangulasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Electoral Activity*

Meningkatkan kesadaran politik masyarakat lokal, karena dalam proses pemilihan secara langsung masyarakat lokal terlibat secara aktif dan akan terbentuknya pemahaman masyarakat terhadap realitas sosial politik yang ada, dan kemungkinan secara aktif mengubahnya, dalam konteks ini kedaulatan rakyat menjadi lebih dipahami.

Upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Bulukumba dilakukan oleh KPUD melalui sosialisasi dengan menggandeng pejabat publik dan tokoh masyarakat. Kegiatan tersebut berisikan materi yang terstruktur tentang pentingnya keterlibatan pemilih pemula dalam menentukan pemimpin di daerahnya. Selain itu metode yang dilakukan lebih banyak melakukan kegiatan dilapangan dibanding melalui diskusi forum.

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa upaya dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dilakukan oleh KPUD dengan menggandeng pejabat publik dimana para pemilih pemula diarahkan terkait seberapa pentingnya keterlibatan mereka

dalam kontestasi pemilihan umum dalam menentukan nasib daerah mereka kedepannya.

Keterlibatan pemilih pemula dalam sebuah kontestasi pemilihan legislative di Bulukumba dilatarbelakangi dengan adanya aktivitas partai yang mengarah kepada pengembangan minat dan bakat para pemilih pemula yang masih berusia remaja. Melalui kegiatan tersebut para pemilih pemula merespon dengan ikut mengkampanyekan salah satu kandidat yang merupakan usungan dari sebuah partai.

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon anggota dewan melalui hoby dari para pemilih pemula merupakan sebuah cara yang dilakukan dalam mendapatkan dukungan serta meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

Kontestasi pemilihan legislatif di Kabupaten Bulukumba tidak terlepas dari kegiatan money politik. Dimana ada beberapa kelompok pemilih milineal mengaku mendapatkan sejumlah uang dari para caleg dalam mendukung salah satu kandidat pada saat pemilihan legislative.

### **Lobbying**

Pelaksanaan lobi menggunakan pendekatan komunikasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Aktivitas komunikasi dapat dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi (profit atau non profit), maupun lembaga pemerintahan. Sedangkan media komunikasi yang dapat digunakan adalah dalam bentuk cetak, elektronik, media luar ruang, budaya, dan sebagainya, yang melalui media tersebut, dapat menggunakan bahasa verbal maupun non verbal.

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa upaya *loby* untuk mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam sebuah kontestasi pemilu melalui pemberian edukasi tentang pentingnya partisipasi aktif dalam mendorong program-program pemerintah untuk pembangunan.

Melobi ialah melakukan pendekatan secara tidak resmi, sedangkan pelobian adalah bentuk partisipasi politik yang mencakup usaha individu atau kelompok untuk menghubungi para pejabat pemerintah atau pimpinan politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau masalah yang dapat menguntungkan sejumlah orang.

Keterlibatan pemilih pemula dalam kontestasi pemilihan legislative 2019 di Kabupaten Bulukumba membuat adanya penambahan DPT yang mengharuskan KPPS mengajukan permohonan penambahan kertas suara kepada KPU sebagai upaya untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan.

### **Organizational Activity**

Berbagai kegiatan dilakukan oleh organisasi publik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Seperti KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat berbagai program dilaksanakan mulai dari pemberian sosialisasi, edukasi politik sampai pada tahap membentuk organisasi yang berfungsi mengarahkan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politiknya.

Dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan KPUD Kabupaten Bulukumba melakukan berbagai upaya salah satunya membentuk sekolah politik. Pada pelaksanaan program tersebut rata-rata peserta yang terlibat adalah para kelompok pelajar. Kegiatan tersebut memberikan edukasi kepada para pemilih pemula tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam menentukan pilihan.

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan kegiatan sekolah politik merupakan program yang mengorganisir pemilih pemula agar lebih muda diberikan arahan tentang pentingnya partisipasi pemilih pemula dalam kontestasi pemilihan umum. Hal ini salah satu upaya yang dilakukan oleh KPUD Bulukumba dalam mendorong partisipasi pemilih pemula pada kontestasi seperti pemilihan legislative.

Aktivitas organisasi pada tahapan pelaksanaan pemilihan umum selain meningkatkan partisipasi politik masyarakat juga memperkuat basis kekuatan massa dari kandidat atau partai politik tertentu. Beberapa agenda politik yang dilakukan partai atau kandidat dalam kampanye memerlukan sumber daya manusia dalam pelaksanaannya. Perlunya mobilisasi massa yang cukup besar dalam memenangkan perhelatan memerlukan pengorganisasian yang harus dilakukan oleh aktor politik.

Dalam memudahkan partai atau kandidat untuk mengorganisir basis massa pada saat di lokasi tempat pemungutan suara beberapa

pemilih menggunakan symbol tertentu agar lebih mudah di deteksi. Hal ini dilakukan selain melihat kapasitas massa juga dapat mempengaruhi psikologis dari pendukung kandidat lain.

### **Contacting**

Membangun komunikasi tentu memerlukan strategi untuk melaksanakan tujuan. Salah satunya KPU dalam melaksanakan fungsinya melalui pendidikan politik dapat dipahami sebagai perbuatan memberi latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia, melalui proses dialogik yang dilakukan dengan suka rela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin, sehingga para penerima pesan dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara.

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi bagi para pemilih pemula menekankan upaya memasukkan program sesuai dengan kebutuhan para pemilih pemula. Sehingga tingkat partisipasi mereka tidak hanya sebatas ajang pemilu tetapi ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Bulukumba.

Satu pihak merumuskan kepentingan (*interest articulation*) dan menggabungkan atau menyalurkan kepentingan (*interest aggregation*) masyarakat untuk disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah, sedangkan pihak lain juga berfungsi menjelaskan dan menyebarkan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan dalam membangun komunikasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pihak KPPS mengundang para pemilih secara formal. Hal tersebut selain merupakan tugas dari KPPS juga diyakini menjadi motivasi bagi pemilih pemula dalam menyalurkan hak suaranya.

### **Violence**

Sebagian besar rakyat tidak lagi memandang penting kampanye bahkan pemilu itu sendiri karena hal ini dianggap tidak lebih dari sekedar rutinitas lima tahunan belaka yang belum pasti akan memberikan dampak langsung terhadap perbaikan kehidupan mereka. Terjadinya penurunan secara beruntun partisipasi masyarakat dalam setiap gelaran

pemilu di era Reformasi merupakan bukti konkretnya. Bahkan, dalam konteks pilkada, di beberapa daerah jumlah suara golput justru lebih besar daripada suara kemenangan pasangan calon.

Upaya para kandidat dalam menawarkan beberapa program kepada pemilih pemula harus ditakar baik-baik terlebih anggota dewan hanya sebagai lembaga pengawas pemerintahan. Menurunnya tingkat partisipasi pemilih tidak terlepas dari janji-janji politik kandidat yang tidak dapat terpenuhi bahkan sampai mencapai pada tingkat tuntutan dari masyarakat.

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa menurunnya tingkat partisipasi pemilih karena tidak mampunya para kandidat yang terpilih merealisasikan janji politik mereka. Hal tersebut berdampak pada tuntutan para pemilih melalui demonstrasi yang ditujukan kepada pemerintah.

Demokrasi perwakilan di Indonesia saat ini mengalami masalah disconnected electoral yaitu adanya keterputusan relasi antara wakil dengan yang diwakili. Sehingga seringkali tindakan yang dilakukan oleh para wakil tidak linier dengan apa yang menjadi aspirasi dan keinginan dari orang-orang yang diwakili (publik).

Salah satu partai yang ikut pada kontestasi pemilihan legislatif Kabupaten Bulukumba 2019 melihat bahwa tuntutan masyarakat dalam hal ini para pemilih pemula menuntut kegiatan kampanye diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang mengorganisir para pemuda. Kegiatan seperti itu menjadi tuntutan setiap pemilih untuk mengarahkan dukungan mereka.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu *electoral activity* dimana melalui pemberian edukasi dengan melakukan pembelajaran dilapangan secara langsung salah satu metode yang dilakukan, selanjutnya para kandidat yang berasal dari partai juga mencoba melakukan pendekatan dengan pemilih pemula dengan membukakan ruang kreasi bagi para pemilih pemula melalui penyaluran minat dan bakat serta hoby para pemilih pemula yang sedang eksis di tengah-tengah masyarakat.

Kedua, *lobbying* dimana para kandidat memaparkan mulai dari penawaran program, sampai mengikutsertakan para pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam struktur tim pemenang calon *legislative*. Ketiga, aktivitas organisasi yang lebih mendorong partisipasi aktif para pemilih dengan melibatkan mereka pada struktur tim pemenang. Kegiatan mengorganisir massa tersebut diharapkan akan meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada setiap kontestasi pemilihan umum di Kabupaten Bulukumba. Keempat, *contacting* melauhi kegiatan kampanye dan pencoblosan tetapi upaya diskusi yang dilakukan kandidat memberikan ruang bagi para pemilih pemula dalam memberikan penawaran-penawaran terkait kebutuhan dan permasalahan pemilih yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi para kandidat jika berhasil menjadi pemenang pada perheletan pemilihan legislative di Kabupaten Bulukumba. Dan kelima, *violence* para pemilih pemula akan mengarahkan dukungan terhadap kandidat jika dapat merealisasikan pembangunan yang menjadi tuntutan masyarakat pada saat masa kampanye pileg 2019. Para pemilih pemula juga tidak segan-segan melakukan aksi demonstrasi menuntut pemerintah jika terjadi pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba.

## 5. REFERENSI

- Asmawi. (2014). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah. *Jurnal Cita Hukum*. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.144>
- Budiarjo, M. (2010). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Elly Novianti, C. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*.
- Fauzi, A. M. (2019). Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019. *Journal of Islamic Civilization*. <https://doi.org/10.33086/jic.v1i01.918>
- Gunawan, M. (2008). *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (DPR, DPRD, & DPD)*. Vsimedia.
- Hadi, A. P. (2015). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangun. *Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya*.
- Huntington, Samuel P. dan Joan M. Nelson. (1994), *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Penerjemah Sahat Simamora. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jurdi, S. (2019). Pergeseran Dan Konfigurasi Politik Hasil Pileg 2019: Kajian Dan Analisis Terhadap Dinamika Politik Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik Profetik*. <https://doi.org/10.24252/profetik.v7i2a1>
- Khairudin. (2019). *Partisipasi Masyarakat. Psikologi Perkembangan*.
- Kharisma, D. (2015). Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. *Jurnal Politico*.
- Komara, E. (2015). Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*.
- Liando, D. M. (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat ( Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014 ). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*.
- MANAN, F. (2017). Relasi Eksekutif - Legislatif Dalam Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*.
- Mas'oeid, M. (2011). *Perbandingan Sistem Politik*. Gadjja Mada University Press.
- Morrison. (2016). Tingkat Partisipasi Politik dan Sosial Generasi Muda. *Visi Komunikasi*.
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula. *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Sartika, R. (2009). Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pengembangan Kecakapan Partisipatoris Pemilih Pemula :Studi Deskriptif Pada Siswa SMA Negeri di Kota Bandung. *S2 Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Subekti, T. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum

- (studi Trun of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum*.
- Sutrisno, cucu. (2017). Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.24269/v2.n2.2017.36-48>
- Tanod, S. T., Rengkung, M. M., & Tondobala, L. (2014). Partisipasi Masyarakat Kecamatan Madidir Terhadap Program Pengelolaan Sampah Kota Bitung. *Arsitektur*.
- Tesoriero, J. I. & F. (2008). *Community Development*. Pustaka Pelajar.
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*.
- Widayati, W. (2015). Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.415-424>
- Yustiningrum, Emilia, R., Ichwanuddin, & Wawan. (2015). Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Politik*. *Jurnal Penelitian Politik*,.